



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 menyebutkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang

- Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
 22. Peraturan Walikota Bitung Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bitung Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 178) diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 5 Februari 2015

WALIKOTA BITUNG,


HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 5 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. EDISON HUMIANG, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KOTA BITUNG

							(Ton)
NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	NPK	ZA	ORGANIK	
1	TANAMAN PANGAN	18	5	5	2	6	
2	HORTIKULTURA	2	0	5	0	2	
3	PETERNAKAN	5	0	0	0	0	
4	PERKEBUNAN	3	0	5	0	2	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	2	0	0	0	0	
JUMLAH		30	5	15	2	10	

JENIS PUPUK : NPK														(Ton)
NO.	SUB SEKTOR	JUMLAH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
2	HORTIKULTURA	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PETERNAKAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PERKEBUNAN	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		15.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00

JENIS PUPUK : ZA														(Ton)
NO.	SUB SEKTOR	JUMLAH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	HORTIKULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PETERNAKAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PERKEBUNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

JENIS PUPUK : ORGANIK

(Ton)

NO.	SUB SEKTOR	JUMLAH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	HORTIKULTURA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PETERNAKAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PERKEBUNAN	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		10.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015

(ton)

NO.	KECAMATAN	JENIS - JENIS PUPUK (An-Organik)				PUPUK ORGANIK
		UREA	SP-36	NPK	ZA	
1.	RANOWULU	14.0	3.0	8.0	1.0	5.0
2.	MATUARI	9.0	1.5	4.0	1.0	3.0
3.	GIRIAN	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	MADIDIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	MAESA	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	AERTEMBAGA	3.0	0.5	2.0	0.0	2.0
7.	LEMBEH UTARA	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
8.	LEMBEH SELATAN	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
JUMLAH		30.0	5.0	15.0	2.0	10.0

Jenis Pupuk : NPK

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	3	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0
2	Matuari	1.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

Jenis Pupuk : Organik

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	2	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0
2	Matuari	1	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0
3	Girian	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0
2	Matuari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

JENIS PUPUK : UREA

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0
2	Matuari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0

Jenis Pupuk : SP-36

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Matuari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Jenis Pupuk : NPK

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	2.5	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0
2	Matuari	1.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	1	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Jenis Pupuk : Organik

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Matuari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015 KOTA BITUNG

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

JENIS PUPUK : UREA

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	1	0
2	Matuari	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

Jenis Pupuk : SP 36

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Matuari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA

NIP : 19741118 200112 1 003